

KONTESTASI UMAT BERAGAMA
(Studi Tentang Perdamaian dan Ketegangan Islam-Kristen
di Kota Bekasi)

Ahmad Zamakhsari
STIT Al Marhalah Al 'Ulya Bekasi
Jl. K.H. Mas Mansyur Np. 91 Bekasi
Email: marhalahulya@gmail.com

Abstract

The contestation phenomenon between Muslim and Christian groups in the context of social-religious relation. This relation affects the conflict and also cohesion (peace). The tensity between Muslim and Christian groups that happened at the arena of preaching and strengthening the reliogion teaching namely mission of bible in Christian (evangelism) and also dakwah islamiyah (amar ma'ruf, nahi' munkar). The tensity did not rise the conflict and violence because of local wisdoms, namely the dialogue mechanism or rembug kampung that met both groups to reconcile. The peace between Muslim and Christian groups is established because the cooperation, undertanding and the experiences of cultural values gave the room to the both groups to build the solidarity, communication or dialogue and cooperation. Cultural velues such as tepo seliro (emphaty), unggah-ungguh (polite and impolite ethics), lung tinulung (helping each other), giving food each other, visiting each other, rembug (musyawarah/discussion), slametan (thanks giving) are able to be understood and actualized to internalize inclusive attitudes to water the harmony between religions adherents. Therefore concludes that culture is the dominant factor in building the peace relation among the different religions groups (Islam and Christian). If the religions groups had applied the velues of local wisdoms, then the gate of religion harmonious is opened largely.

Keywords : *contestation; Islam; Christian; Peace; conflict*

Abstrak

fenomena kontestasi antara kelompok Islam dan Kristen dalam konteks hubungan sosial-keagamaan yang menyebabkan ketegangan dan juga perdamaian. Ketegangan antara kelompok Islam dan Kristen terjadi pada arena penyebaran atau penguatan ajaran agama yaitu misi penginjilan dalam Kristen (*evangelisme*) dan juga *dakwah islamiyah (amar ma'ruf nahi munkar)*. Ketegangan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik kekerasan karena kearifan lokal berupa mekanisme dialog atau *rembug kampung* mempertemukan kedua kelompok untuk rekonsiliasi. Perdamaian antara kelompok Islam dan Kristen terjadi karena kesamaan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai budaya memberikan ruang bagi kedua kelompok membangun solidaritas, komunikasi atau dialog dan kerja sama. Nilai-nilai budaya seperti *tepo seliro, unggah-ungguh, lung tinulung* (saling menolong), saling hantar makanan, saling kunjung, *rembug* (musyawarah), *slametan* (upacara syukur) mampu dipahami dan diaktualisasi membentuk sikap inklusif untuk menghidupi kerukunan antar umat beragama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan faktor dominan dalam membangun relasi damai antar kelompok agama berbeda (Islam dan Kristen). Jika kelompok-kelompok agama memiliki kebiasaan menerapkan nilai-nilai kearifan budayanya, semakin besar peluang terbangunnya kerukunan antar umat beragama.

Kata Kunci : Kontestasi; Islam; Kristen; Perdamaian; Ketegangan

PENDAHULUAN

Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan kepentingan agama,

terutama Islam dan Kristen hampir mewarnai seluruh generasi, mulai dari Perang Salib (Karen Amstrong: 2001,27)

hingga berbagai perusakan tempat ibadah di berbagai tempat. Di Indonesia, cerita kelam ini dibingkai dalam terminologi khusus SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang menandakan bahwa isu agama menjadi salah satu isu yang rentan memicu konflik. Konflik Ambon dan Poso, (Hasrullah: 2009, 153) pada awal masa reformasi merupakan contoh nyata konflik atas nama agama. Sekalipun banyak orang mengatakan bahwa konflik horizontal yang merebak di Nusantara pada akhir abad yang lalu diakibatkan oleh ketimpangan ekonomi dan secara formal pemerintah juga mengatakannya, tetapi tidak dapat disangkal, nuansa keagamaan, meminjam istilah A.A.Yewangoe, (A.A.Yewangoe: 2002, 43) sangat menonjol.

Sejarah mencatat bahwa konflik antar kelompok agama dan keyakinan yang melahirkan tindakan kekerasan atas nama agama memang masih terjadi pasca tumbanganya Orde Baru yang mencapai rata-rata lebih dari 200 kasus setiap tahunnya. Istilah kekerasan berbasis agama (*religious-based violence*), menurut Sumanto Al Qurtuby, tidak hanya mengacu pada apa yang dirumuskan Johan Galtung sebagai *direct/physical violence*, seperti kerusuhan, penyerangan, perusakan, pembakaran dan lain-lain, melainkan juga *cultural violence* atau *symbolic violence* (Pierre Bourdieu) berupa pelecehan, stigmatisasi, penghinaan, penyusutan terhadap kelompok agama/kepercayaan tertentu. (Sumanto Al Qurtuby: 2009, 186-187) Terjadinya benturan antar agama di Indonesia khususnya Islam dan Kristen selalu bermula dari ketertutupan masing-masing tentang agenda dakwah dan isu konversi. Kedua agama besar ini mempunyai perhatian dan doktrin terhadap dakwah atau misi dan pada titik itulah keduanya berpotensi saling bertabrakan. (Barbara Brown Zikmund: 1998, 25)

Menyadari bahwa konflik antar umat beragama adalah persoalan serius, berbagai pihak seperti pemerintah, tokoh agama dan pemerhati sosial politik terus berupaya membangun resolusi konflik, salah satunya melalui dialog antar umat beragama. (Mukti Ali, 1971) Namun, penyelesaian konflik antar umat beragama dalam bentuk dialog mendapat kritik dari sejumlah kalangan agamawan sendiri dan sejumlah pemerhati sosial keagamaan karena tidak pernah ada evaluasi untuk melihat capaian serta tantangan. Forum kerukunan ini belum bisa menjadi media untuk membendung konflik umat beragama semasa reformasi yang menunjukkan intensitas dan perluasannya. Franz Magnis Suseno menyinggung bahwa dialog Islam-Kristen selama ini sering mengalami kebuntuan karena perbedaan pandangan teologis baik Islam dan Kristen sendiri. (Franz Magnis Suseno: 2003, 26) Dialog dengan semangat mencari kesamaan pandangan teologis jelas tidak mungkin dilakukan karena pada dasarnya keduanya tidak bisa dipersatukan. Namun yang sangat dimungkinkan dalam sebuah dialog adalah upaya untuk saling mengenal lebih dekat tentang agama sebagai langkah meminimalisir prasangka serta salah paham. (Franz Magnis Suseno: 2003, 27)

Pendekatan dialog dalam membangun relasi harmonis antar agama seharusnya memang lebih banyak memberikan porsi pada pendekatan relasi budaya atau mekanisme kultural masyarakat yang banyak mendiskusikan hal-hal praktis menyangkut persoalan bersama, seperti kemiskinan, pendidikan dan lain sebagainya. Pemikiran tersebut sebenarnya sudah mengemuka sejak tahun 1978, namun pada tataran implementasi masih mendapati berbagai hambatan. Model pendekatan dialog praktis kemungkinan dapat dilihat dari fenomena relasi masyarakat Islam dan Kristen di Kota Bekasi. Mekanisme

kultural atau budaya dalam membangun dialog praktis yang inklusif tersebut merupakan pencapaian atas proses panjang antara kelompok Islam dan Kristen dalam menyemai toleransi antar agama yang berbasis pada kekuatan nilai-nilai budaya. Budaya di Kota Bekasi memberikan ruang bagi bertemunya kedua kelompok berbeda dalam tindakan sosial yang bertendensi teologis. Namun model relasi yang harmonis Islam-Kristen ini bukanlah sesuatu yang instan, melainkan terbangun melalui pergumulan atau dinamika hubungan yang cukup panjang.

Perjumpaan Islam-Kristen di Indonesia sudah berlangsung pada era kolonialisme Belanda, dimana umat Islam pada umumnya menganggap agama Kristen sebagai agama yang disebarkan oleh Kolonial Belanda. Umat Islam langsung bereaksi keras terhadap misi Kristen sebagaimana sikap keras mereka juga terhadap kolonialisme. Perlawanan keras dari umat Islam ini memicu pemerintah Kolonial Belanda dan misionaris untuk saling dukung. Puncaknya, pada tahun 1854 Kolonial Belanda mengeluarkan dekrit atau peraturan yang mengatur penginjilan. Dekrit tersebut menyepakati bahwa administrasi gereja bertugas menjaga doktrin Kristen, sehingga perlu diberikan fasilitas misionaris termasuk keuangan dan pembebasan pajak. Sejak saat itu kristenisasi semakin disadari oleh umat Islam sebagai sebuah ancaman mengingat semakin meningkatnya jumlah pemeluk Kristen dan ditambah keberpihakan pemerintah Kolonial Belanda kepada gereja. Keberpihakan Kolonial Belanda terhadap gereja kian memperburuk hubungan kelompok Islam dan Kristen yang ditandai dengan masifnya perlawanan dari pihak Islam. Kondisi tersebut semakin membuat umat Islam bersikap eksklusif yang kemudian mendorong terjadinya konsolidasi serta

intensifikasi identitas Islam. (Azyumardi Azra: 1999, 40)

Jika Kolonial Belanda menganak-emaskan Kristen, sebaliknya pada masa penjajahan Jepang, umat Islam mendapat angin segar untuk mengembangkan agama, termasuk organisasi-organisasi yang berbasis Islam. Jepang berhasil menerapkan provokasi masa Islam untuk menyingkirkan kekuatan Belanda dan umat Kristen dari bumi nusantara. Pada masa ini pula gerak misionaris Kristen juga dibatasi bahkan mengalami stagnasi. (Harry J. Benda: 1985, 154) Masa tersebut bagi umat Kristen dikenal dengan istilah masa *rayahan* (Soekoco dan Lawrence M. Yoder : 2010, 307-311) (penjarahan atau perampokan).

Ketegangan antara kelompok Islam dan Kristen juga mencuat kembali pada paska tahun 1965 yaitu setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S PKI). Paska peristiwa ini, ada konversi besar-besaran mantan anggota PKI atau orang yang dituduh terlibat dalam organisasi di bawah PKI melakukan konversi ke agama Kristen. (Mujiburrahman: 2006, 107)

Sejarah kontestasi dan juga kekerasan antara kelompok Islam dan Kristen tersebut lantas mendorong para tokoh agama dan juga masyarakat mencari format membangun kerukunan umat beragama. Budaya menjadi media yang utama untuk dijadikan ruang membangun kembali komunikasi, interaksi dan kerjasama antar pemeluk agama tersebut. Sebagai contoh, pada akhir tahun 70-an, masyarakat menghidupkan kembali budaya saling-kunjung memanfaatkan momentum perayaan hari raya, baik Idul Fitri maupun Natal. Saat Idul Fitri, warga Kristen turut mengunjungi warga Muslim untuk meminta maaf "lahir batin" dengan memilih hari kedua lebaran sebagai waktu kunjung. Pemilihan waktu tersebut didasarkan niat menghormati

perayaan hari besar bagi internal umat Islam sendiri dimana pada hari tersebut banyak kerabat atau tetangga terdekat yang saling berkunjung.

Kearifan serupa juga terjadi saat Natal yang dirayakan bertepatan dengan perayaan tahun baru Masehi (1 Januari). Masyarakat Muslim bersilaturahmi ke keluarga dan tetangga Kristen untuk memberikan ucapan *sugeng warso enggal, ngaturaken lepat kulo* (selamat tahun baru, maafkan kesalahan saya). Momen tahun baru Masehi dipilih sebagai strategi untuk menghindari perdebatan boleh tidaknya mengucapkan "selamat Natal" kepada penganut Kristen yang pernah difatwakan haram oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan fatwa No. 432/1981 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1981, meskipun pada akhirnya fatwa tersebut dihentikan peredarannya melalui Surat Keputusan MUI No. 139 tahun 1981.

Tidak hanya berhenti pada saling mengucapkan selamat dan memaafkan, baik momen Idul Fitri maupun Natal di tahun baru Masehi biasanya didahului dengan memberi makanan jelang hari raya. Tradisi saling antar makanan ini juga menjadi kesadaran bersama untuk berbagai kegiatan sosial-keagamaan. Pada saat *slametan* (Clifford Geertz: 1988, 54-89) upacara siklus kehidupan seperti kelahiran, perkawinan terdapat tradisi berbagi makanan ke kerabat, tetangga tanpa membedakan faktor agama.

Dalam konteks wilayah Bekasi, Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyebut wilayahnya masuk dalam urutan ke-enam sebagai daerah terburuk dalam hal kerukunan umat beragama. Hal itu disampaikan Rahmat dalam acara Apel Akbar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi pada hari Sabtu, 16 April 2016.

Berdasarkan data yang dia punya, jumlah penduduk di Kota Bekasi mencapai 2,3 juta orang. Jumlah itu terdiri

dari 2 juta pemeluk agama Islam, pemeluk Katolik 65.000 orang, Budha 12.000 orang, Kristen Protestan 195.000 orang, Hindu 47.000 orang dan Konghucu 196 orang. Dilihat dari jumlah tersebut, maka Kota Bekasi cukup heterogen dari segi agama. Oleh karena itu, dia berharap agar keberadaan Majelis Umat yang dibentuk, mampu meningkatkan kerukunan beragama di wilayah setempat. "Kami targetkan pertengahan tahun atau Juni ini, Majelis Umat sudah bisa bekerja".

Budayawan Bekasi, Budi Santoso mengapresiasi upaya Pemda dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Namun dia meminta, acara yang dihadiri oleh sekitar 6.500 orang dari berbagai pemeluk agama itu, bukan hanya seremonial belaka yang mengatasmakan kerukunan umat beragama. Sebab Budi menyebut, kasus konflik keagamaan di Kota Bekasi kerap muncul. Salah satunya dipicu adanya rencana pendirian rumah ibadah. Menurut dia, kehadiran sebuah rumah ibadah sering kali mengganggu antar umat beragama, bahkan memicu konflik horizontal karena lokasinya berada di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain. Rumah ibadah dalam kaitan ini, tidak hanya dilihat sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaan, tetapi juga sebagai simbol keberadaan suatu kelompok agama tertentu. "Permasalahannya menjadi rumit jika jumlah rumah ibadah tersebut dipandang oleh pihak lain tidak berdasarkan keperluan melainkan untuk kepentingan penyiaran agama pada komunitas lain".

Oleh karena itu, Budi berharap agar pembentukan Majelis Umat ini sudah didasari oleh berbagai kajian. Salah satunya pemda membuat pemetaan konflik agama berdasarkan karakteristik wilayah. Dengan demikian, pemda akan mudah mengatasi permasalahan tersebut karena telah mengetahui pola konflik agama di sana.

Pencarian format tersebut bukan sesuatu yang mudah dan instan, melainkan melalui proses rekonsiliasi untuk menemukan mekanisme dalam membangun dan merawat relasi antar umat beragama. Selanjutnya fenomena relasi keduanya seperti dalam beberapa contoh di atas telah menjangkau banyak aspek kehidupan sosial dan lebih dari persoalan solidaritas dan saling menghargai. Relasi tersebut bahkan memenuhi apa yang oleh Michael Walzer disebut sebagai koeksistensi damai (*peaceful coexistence*), dimana kelompok yang berbeda secara identitas menyemai toleransi. (Michael Walzer: 1997, 2)

Masyarakat Bekasi bahkan memiliki mekanisme tertentu untuk menjembatani persoalan konsep teologis dan keinginan hidup berdampingan secara damai yang dipengaruhi oleh kemampuan mengkombinasikan konsep tentang keyakinan agama dan konsep tentang hubungan sosial-budaya. Inilah yang dimaksud Nurcholis Madjid sebagai "pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan keadaban" (*genuine engagement of diversity within the bond of civility*) (Nurcholis Madjid: 2009, 119) dan bukan lagi sekedar "kebaikan negatif" yang hanya untuk sekedar menyingkirkan fanatisme.

Jika meminjam *framework* relasi sosial yang diformulasikan oleh Departemen Ekonomi dan Sosial PBB, maka relasi Islam dan Kristen di Bekasi merupakan relasi yang unik yang meliputi 6 relasi sosial yaitu; 1) fragmentasi, 2) eksklusivitas, 3) polarisasi, 4) ko-eksistensi, 5) kolaborasi, 6) kohesi. Tiga relasi pertama adalah mengarah pada kondisi yang negatif. Sementara tiga relasi lainnya menunjukkan kondisi yang mendorong pada relasi damai atau integrasi sosial.

METODE

Penelitian ini di Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya

dan Kota Harapan Indah Pondok Ungu Permai Kota Bekasi, Jawa Barat. Tempat tersebut merupakan lokasi yang terjadi persengketaan antar Islam-Kristen yang sampai detik ini sebagian masyarakat masih merasakannya. Karena itu, maka termasuk penelitian lapangan, dimana penulis selaku peneliti terlibat aktif langsung di lokasi penelitian untuk melihat dan merasakan situasi sosial untuk mendapatkan data-data terkait tujuan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah sosio-historis dengan menelusuri pengalaman sejarah masyarakat Bekasi yang sedikit banyak mempengaruhi terjadinya konflik dan perdamaian antara kelompok Islam dan Kristen di sana. Pendekatan ini juga berupaya melihat bagaimana masyarakat di sana mempertahankan nilai atau filosofi kebudayaan yang dimilikinya untuk memperkuat kerukunan antar kelompok agama berbeda.

Teori *habitus* Pierre Bourdieu digunakan sebagai kerangka untuk membedah fenomena kontestasi antara kelompok Islam dan Kristen baik yang mengarah pada terjadinya konflik maupun perdamaian. *Habitus* didefinisikan sebagai seperangkat skema (tatanan) yang memungkinkan agen-agen menghasilkan keberpihakannya kepada praktek-praktek yang telah diadaptasi atau disesuaikan dengan perubahan situasi yang terus terjadi. (Peter Burke: 2001, 179-181) *Habitus* dikonsepsikan dalam berbagai cara seperti sebagai kecenderungan empiris untuk bertindak dalam cara khusus, motivasi, preferensi, cita rasa dan emosi, perilaku yang mendarah daging, pandangan tentang dunia (kosmologi) dan kemampuan sosial praktis.

Sumber utama yang digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah data- data tentang konflik, ketegangan dan perdamaian antara kelompok Islam dan Kristen yang tersaji dari fenomena sosial-keagamaan. Data yang

dimaksudkan adalah berbagai peristiwa yang menyebabkan kedua kelompok bersitegang dalam proses penyebaran dan penguatan kelompok agama yang dimulai sejak pertemuan Islam dengan Kristen masa Kolonial Belanda hingga penelitian ini berlangsung. Sedangkan data yang menunjukkan perdamaian diperoleh dari berbagai konsep kultural hubungan sosial-keagamaan antara kelompok Islam dan Kristen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara mendalam, observasi *live in*, dan kajian data tertulis berbagai dokumen. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi geografis, pola kehidupan sehari-hari penganut Muslim dan Kristen, interaksi antar masyarakat, budaya dan tradisi masyarakat, kegiatan ibadah, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam wawancara, peneliti melakukan komunikasi secara langsung dengan informan, baik tokoh agama, pengurus masjid dan gereja, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, jemaat gereja, jamaah masjid, serta anggota masyarakat yang dapat memberikan informasi sesuai tujuan penelitian.

Data yang diperoleh dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya dipilah menjadi dua bagian, yaitu data yang menunjukkan relasi ketegangan dan relasi perdamaian baik dari aspek kultural dan data pemakna teologisnya. Pemilahan data juga dilakukan berdasarkan konteks pedukuhan yang ada di Kota Bekasi untuk melihat komparasi komposisi Islam-Kristen terhadap beberapa fenomena sosial-keagamaan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisa pola-pola pemaknaannya sehingga dari sanalah kita dapat merumuskan model relasi Islam-Kristen di Kota Bekasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

B.J. Boland menegaskan bahwa tidak pernah terjadi di manapun di lingkungan dunia Islam (mungkin dengan

pengecualian di Indonesia) kaum Muslim merasa bahwa rekan senegarannya yang bukan beragama Islam adalah „salah seorang dari kita.“ (B.J. Boland: 1985, 234) Pernyataan ini menyiratkan esensi kerukunan antar umat beragama, yang merupakan satu kesatuan dan hidup dalam koeksistensi damai (*peaceful co-existence*). Dalam sejarahnya umat Islam Indonesia tidak bisa mengabaikan begitu saja kemunculan dan perkembangan gereja-gereja di Indonesia yang terkait erat dengan proses kolonialisme Belanda. Sebelum masa kemerdekaan, gereja dipandang sebagai bagian kekuasaan Kolonial Belanda. Namun kondisi itu berbalik ketika masa perang kemerdekaan dimana umat Kristen juga berada di garda depan perjuangan. Melalui perjuangan melawan Kolonial inilah menurut B.J. Boland umat Islam dan Kristen di Indonesia saling mengenal dan saling menghormati sebagai rekan senegara, dan hubungan keduanya untuk pertama kalinya menjurus ke arah yang menyenangkan.

Perasaan sebagai rekan senegara juga tidak hanya tertuang dari peristiwa perang kemerdekaan saja, namun juga tumbuh dalam berbagai bidang kehidupan. Di Bekasi, relasi damai antara Islam dan Kristen muncul dari interaksi keduanya dalam berbagai fenomena kehidupan sosial-keagamaan. Fenomena-fenomena tersebut lahir sebagai strategi budaya membangun mekanisme dalam merespon ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam relasi keduanya. Mekanisme kultural yang menjadi fenomena di Bekasi saat ini, jika dicermati merupakan alternatif penyelesaian konflik di tengah kebekuan metode dialog antaragama yang terkesan formal dan kaku. Boleh dikatakan bahwa interaksi yang dibangun Islam dan Kristen dalam berbagai aspeknya adalah bentuk dialog praktis, non-formal dalam berbagai kesempatan pertemuan keduanya, baik di ranah sosial-budaya maupun teologi.

Dalam menganalisa konflik atau ketegangan diperlukan sebuah peta konflik yang bertujuan melihat konflik hingga akar-akarnya. Joice L. Hocker dan Wiliam Wilmot (Joice L. Hocker dan Wiliam Wilmot: 1992, 15) mempunyai pandangan bahwa konflik merupakan hal yang tidak normal yang bisa mengganggu stabilitas, sehingga konflik harus segera untuk diselesaikan. Biasanya ketika dua kelompok berkonflik seringkali sulit bagi anggota masyarakat untuk bersikap netral. (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubbin: 2004, 243) Salah satu sebabnya adalah pihak yang berkonflik seringkali mencari dukungan dari para anggota lain dan menuntut agar mereka bisa bergabung dalam pihaknya. Akibatnya banyak pihak ketiga yang seharusnya netral ikut bergabung dengan pihak yang lebih dekat dengannya atau yang tampak tidak begitu tereskalasi sehingga lebih pantas disebut sebagai pihak yang bertahan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya polarisasi masyarakat, sehingga konflik cenderung semakin tereskalasi lebih jauh. Kontestasi kelompok Islam dan Kristen dalam tiga peristiwa yang akan dijelaskan dalam sub bab ini tidak semuanya menyebabkan polarisasi dengan eskalasi konflik yang jauh. Masih ada pihak-pihak yang netral, yang berkontribusi pada upaya menjaga kerukunan. Kontestasi, meskipun memiliki akar historis yang sama, namun konteksnya berbeda, sehingga eskalasi dan dampak konflik pun berbeda tingkatannya.

Dari pengalaman konflik antara kelompok Islam dan Kristen di Bekasi, kecurigaan terhadap aktivitas dakwah atau misi merupakan akar utama konflik. Ketika kecurigaan ini menguat, maka potensi konflik terbuka bisa saja terjadi. Konflik atas penyelenggaraan pengajian Akbar dan KKR (Kebaktian Kebangunan Rohani) memang tidak sampai pada konflik horizontal yang mengarah pada kekerasan, namun menyebabkan

renggangnya relasi sosial keduanya. Protes tokoh-tokoh Kristen atas penyelenggaraan pengajian akbar dan protes ulama Islam atas kegiatan KKR jika dicermati faktor penyebabnya bukanlah karena perbedaan doktrin teologis, namun lebih kuat karena konteks sosiologis yang memicunya. Faktor sosial yang memicu konflik dalam kasus pengajian akbar 1996 dan KKR 2009 tersebut salah satunya sangat kuat dipicu masih adanya sentimen keagamaan yang ditandai dengan adanya rasa saling curiga, dan juga stereotype antar kelompok. Hal ini senada dengan Koentjaraningrat yang menyebut bahwa terjadinya suatu konflik karena adanya kecurigaan dalam interaksi sosial. Rasa curiga tersebut bisa disebabkan oleh adanya pandangan tidak wajar atas golongan lain, atau stereotype negatif terhadap kelompok lain. Namun yang perlu dicatat disini adalah bahwa sentimen tersebut berangkat dari beberapa tokoh agama dan beberapa anggota jemaah masing-masing. Bahkan untuk kasus KKR, sentimen justru muncul dari tokoh dan kelompok Islam di luar Bekasi.

Sebagaimana pemaparan di atas, dalam kasus tersebut tokoh Kristen menganggap bahwa dengan adanya kegiatan pengajian yang menghadirkan mantan pendeta dianggap sebagai upaya untuk mempengaruhi warga Kristen di sekitar lokasi pengajian agar pindah ke agama Islam. Begitu pula sebaliknya, kegiatan KKR dianggap mempunyai misi kuat untuk membujuk umat Islam agar pindah ke Kristen dengan pemberian bantuan dan pelayanan kesehatan. Maka sentiment antar kelompok tersebut diwujudkan dengan tuduhan atas praktek atau modus penyebaran agama, seperti tuduhan kristenisasi yang dialamatkan kepada panitia KKR 2009.

Istilah penyebaran agama sejauh ini memang di banyak konteks lebih berkonotasi negatif. Istilah ini diidentikan

dengan tindakan ekspresif yang dilakukan dengan tujuan mencoba mengubah keyakinan agama, afiliasi keagamaan atau identitas keagamaan orang lain. (Tore Lindholm dkk: tth, 531) Meskipun *truth claim* merupakan milik setiap agama yang menjadikan agama menjadi agama syiar, dakwah atau misi, namun dalam kehidupan berbangsa perlu mengindahkan aturan-aturan yang berlaku. Oleh karenanya, isu penyebaran agama menjadi isu sensitif bagi masyarakat Bekasi khususnya bagi Islam sebagai agama yang terlebih dahulu berkembang di Bekasi. Isu penyebaran agama juga seakan mengorek luka lama atas kematian misionaris Jawa yaitu Benyamin, yang terbunuh oleh kelompok Islam. Isu tersebut kemudian memunculkan kembali sentimen keagamaan masing-masing sehingga bisa muncul sikap saling mencurigai dan memberikan kesan negatif kepada pihak lain.

Sentimen ini kemudian melahirkan sebuah sikap dan persepsi negatif kepada pihak lain yang bisa mengarah pada meluasnya eskalasi konflik. Semula sikap curiga muncul dalam diri tokoh-tokoh agama, lalu menyebar kepada para pengikutnya dan masyarakat. Bentuk eskalasi konflik ini adalah melihat pihak lawan sebagai pihak yang tidak bermoral, kurang dapat dipercaya, kurang ramah, atau senang bermusuhan. (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin: 2004, 211) Ketika dalam situasi konflik, dua kelompok dalam masyarakat seringkali sulit untuk tetap bersifat netral. Alasannya adalah para aktor dalam konflik cenderung mencari dukungan para anggota dari asal kelompoknya.

Konflik di atas jika ditarik lebih dalam terkait konteks sejarahnya sangat erat dengan kekecewaan kalangan Muslim terhadap meningkatnya jumlah pemeluk Kristen di Indonesia karena proses konversi dan kristenisasi. (M.

Natsir: 1988, 2017) Sampai saat ini, beberapa informan masih mempunyai anggapan terhadap proses kristenisasi yang terus berjalan melalui beberapa bidang garapan. Pendidikan misalnya, merupakan bentuk yang paling lama sekaligus banyak dilakukan gereja-gereja di Indonesia sejak abad 17.

Mendiskusikan toleransi dan kebebasan beragama saat ini masalah sangat penting bahkan wajib mengingat konteks kemajemukan bangsa Indonesia seperti dua sisi yang mana bisa memperkuat kerukunan dan di satu sisi berpotensi memicu konflik, baik berbasis suku, agama dan golongan. Elemen agama sebagai bagian kemajemukan perlu mendapat perhatian tersendiri, mengingat sejarah konflik dan ketegangan di masyarakat dewasa ini sebagian besarnya adalah kontribusi agama. (Cifford Geertz: 1971, 165-217) Atau dengan bahasa lain agama sering menjadi inspirasi seseorang untuk tindak-tanduk kekerasan (*religious inspired violence*).

Beberapa tahun belakangan ini banyak lembaga yang bergiat di isu HAM (Hak Asasi Manusia) dan juga kebebasan beragama mulai melakukan monitoring dan dokumentasi atas kasus intoleransi. Kasus atau peristiwa tersebut diantaranya berupa tindakan kekerasan dan penyerangan atas nama agama oleh suatu kelompok agama kepada kelompok agama lain yang dipicu oleh pihak yang mengklaim dirinya benar kepada pihak-pihak yang diklaim berbeda dan dianggap melakukan penodaan agama.

Agama sebagai sistem nilai memang mengandung banyak imajinasi bagi pemeluknya yang menjadikan nilai menjadi mutlak, sejalan dengan proyeksi agama yang oleh Karen Armstrong diistilahkan sebagai „perang kosmis“. (Karen Armstrong: 2000, XII) Bagi kalangan radikal agama, yang membenarkan agama sebagai penguah kekerasan menempatkan dirinya sebagai yang paling benar dan punya legitimasi

melakukan kekerasan atas nama agama. Perspektif ini oleh Arkoun (Mohammed Arkoun: 2001) dinilai cukup dangkal dalam memahami agama yang hanya sebagai nalar teologis yang mengagungkan Tuhan dan ritual-ritual, tetapi tidak sensitif terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Oleh karenanya Arkoun menganjurkan orientasi keagamaan diarahkan pada nalar kritis, yaitu sebuah karakter beragama yang mengharuskan agama lebih peduli pada persoalan umat manusia yang kompleks.

Dalam konteks membina kerukunan antar umat beragama, peran agama harusnya didorong untuk menjadi katalisator pencegah disintegrasi sosial masyarakat yang plural. Kekuatan agama, dapat diarahkan untuk memberikan kekuatan pada upaya penyelesaian masalah sosial. Peter L Berger misalnya mengemukakan bahwa agama merupakan sistem simbolik yang memberikan penjelasan secara meyakinkan serta komprehensif tentang realitas, tragedi, dan ketidakadilan. (Peter L Berger: 1991)

Hubungan kedua agama abrahamik ini, Islam dan Kristen tentu bukanlah suatu fenomena yang baru dalam sejarah agama. Fenomena tersebut berlangsung cukup lama yaitu 14 abad, seusia dengan kelahiran Islam itu sendiri. Rentang waktu yang cukup panjang tersebut menjadi saksi dari hubungan keduanya yang ditandai dengan periode perdamaian yang mengarah pada kerjasama dan juga konfrontasi, kesalahpahaman, dan ketidakpercayaan. Sejak itu pula kedua agama ini mempunyai bentuk hubungan *ambivalen* yang berpotensi konflik sekaligus saling membangun komunikasi atau dialog yang konstruktif.

Sebagaimana telah disinggung dalam bab pertama, Paul Knitter dalam buku *Introducing to Theologies of Religion* (Paul Knitter: 2002) telah memperkenalkan pola-pola relasi

antaragama yang terbagi dalam empat model; model penggantian, pemenuhan, mutualitas, dan penerimaan. Model keempat yaitu penerimaan merupakan model yang tepat untuk menggambarkan pola relasi antara umat Islam dengan Kristen di Bekasi yang merupakan sebuah bentuk relasi harmonis interkasi antar kedua agama untuk menjaga dan memelihara kerukunan.

Di lain pihak, pola relasi harmonis tersebut juga mendapat perhatian dari Tarmizi Taher yang menyebut ada lima (5) pola, yaitu; (Asep Syaefullah: Tth, 199) Pembiaran dan aliansi (*agreement and alliance*), perlindungan dan perlakuan sebagaimana mestinya (*protection and property*), penghargaan dan persahabatan (*respect and partnership*), sinkretisme dan supremasi (*syncretism and supersession*), pluralisme dan perdamaian (*pluralism and peace*). Pola-pola ini dalam konteks Bekasi sangatlah relevan, mengingat kedua umat beragama lebih banyak dapat hidup berdampingan. Perlindungan dan perlakuan ditunjukkan dengan penerimaan anggota keluarga yang berbeda agama, atau memilih pasangan yang berbeda dari agama keluarga. Dalam administrasi dan tata pemerintahan, pelayanan juga diberikan dengan prinsip keadilan untuk semua, bukan semata-mata untuk kepentingan golongannya sendiri.

Sementara penghargaan dan persahabatan ditunjukkan kepada tetangga yang sedang merayakan hari besar, dengan mengunjungi dan mengucapkan selamat hari raya. Ini bentuk pertalian sejati antar umat yang hidup dalam situasi perbedaan. Sedangkan pola pluralisme dan perdamaian, ditunjukkan dengan adanya persamaan hak atas agama. Persamaan ini dimaksudkan dengan melihat titik temu agama untuk banyak berbicara pada kontribusi pemecahan soal-soal keseharian. Teologi dalam beragama yang mengakui keberadaan agama lain yang

harus dihargai menjadi kunci dalam memperkuat sikap pluralis.

Harmonisasi dalam pola-pola di atas bisa terwujud ketika umat beragama meninggalkan model konfrontasi dan konflik, mengingat ini bertentangan dengan ajaran agama, dan secara sosial menimbulkan derita kemanusiaan. Model relasi berbasis budaya atau kearifan lokal yang mengedepankan toleransi sejalan dengan konsep Michael Walzer yang menyebut adanya *peaceful coexistence* atau koeksistensi damai dalam kelompok yang berbeda. (Michael Walzer: 1997, 2) Jika kedua agama bisa berdampingan secara damai, Wiliam Montgomery Watt tetap memberikan peringatan terkait dengan konversi, dan juga penyebaran agama yang menjadi faktor rawan retaknya hubungan antaragama. Dia menawarkan kemungkinan kesepakatan antar agama, bahwa perbuatan menarik pemeluk agama lain sebaiknya dilarang. (W. Montgomery Watt: 1991) Perbuatan yang dimaksud adalah kegiatan yang tujuannya mengganggu orang lain yang sudah beragama untuk memeluk agamanya yang artinya bertujuan untuk menambah jumlah pemeluknya.

Dari analisa pola relasi antar umat beragama di Bekasi, setidaknya ada beberapa situasi yang memperkuat relasi damai Islam dengan Kristen. Pertama, kondisi sosial (*social conditioning*). Meskipun situasi sejarah menempatkan kedua umat beragama dalam kontestasi, namun secara sosial masyarakat tidak terpengaruh jejak sejarah dalam dendam yang berkelanjutan. Kedua, kondisi kultural (*cultural setting*), yaitu budaya Jawa dengan berbagai nilai atau falsafah mampu menjadi fragmen perdamaian di Bekasi dengan merangkul kedua umat beragama dalam kesatuan budaya. Budaya Jawa seperti seperti *tepo seliro* menjadikan nilai kehidupan terinternalisasi dalam kehidupan mereka. Pada kenyataannya latar

budaya ini membentuk sikap keagamaan masyarakat yang inklusif dan toleran dengan menghargai nilai-nilai budaya yang dianutnya.

Ketiga, kondisi politik (*politic conditioning*). Tidak sebagaimana potensi politik dalam mempengaruhi konflik antaragama yang umumnya terjadi di skala nasional maupun internasional, di Bekasi kondisi politik lokal cenderung stabil.

Dari pemaparan diatas dapat digarisbawahi bahwa inti dari relasi damai antar agama adalah pengakuan atas agama lain yang lahir dari sikap inklusif, mau memahami kepercayaan orang lain. Norman Daniel dalam bukunya yang berjudul *Islam and the West: The Making of an Image* (Norman Danie: 1997) dan RW Southern dalam buku *Western View of Islam in the Middle Ages* berpendapa bahwa hubungan timbal-balik baru bisa terjadi dengan pengenalan terlebih dahulu, lalu berbicara dalam konteks hubungan sosial umat beragama.

Harold Coward menyebut agama di masa depan adalah agama-agama yang akan mampu hidup berdampingan secara menyenangkan dalam sebuah komunitas dunia. (Harold Coward: 1994) Menurutnya, pluralisme akan selalu menuntut manusia agar saling membagi pemahaman partikular mengenai agama dengan orang lain. Maka konteks di Bekasi saat ini bisa menjadi salah satu model membangun dan menjaga keberlanjutan kerukunan antar umat beragama sebagaimana yang diwacanakan Harold Coward. Namun, mewujudkan situasi dimana umat beragama saling berdampingan tidaklah gampang. Terdapat sejumlah tantangan yang sangat mendasar yang justru jika tidak cepat direspon akan menggerogoti kondisi kerukunan. Ataulah Siddiqui mengidentifikasi beberapa tantangan dalam interaksi Islam dengan Kristen

yang sesuai dengan konteks Bekasi. (Ataullah Siddiqui: 1998, 81-85)

Pertama, tantangan dalam konteks teologi, dimana diperlukan banyak perdebatan dan diskusi. Penganut kedua agama ini sama-sama mengklaim sebagai penganut agama yang unggul, yang menyatakan bahwa agama mereka adalah satu-satunya agama yang dapat diterima dan yang memberikan jalan keselamatan. (Alwi Shihab: 1999, 92) Karena kedua agama ini adalah agama misi, maka sering didapati para penganutnya ada kehendak menunjukkan ajaran kepada orang lain. Sayangnya, pemenuhan panggilan misi sering menimbulkan persaingan dan berujung pada gesekan-gesekan di kedua pihak.

Kedua, tantangan sosial seperti perkawinan beda agama. Perbedaan agama pada masa global seperti ini tidaklah menjadi sebab seseorang untuk tidak memilih pasangan hidup. Namun ada persoalan lain ketika pernikahan beda agama ditaraik dalam ranah hukum agama. Di kalangan umat Islam sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai hal tersebut. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak tentang pernikahan beda agama ini, dan sebagian lainnya memperbolehkan secara mutlak. Di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa tentang haramnya pernikahan beda agama per 1 Juni 1980, yang kemudian didukung dengan Inpres No. 1 Tahun 1991.

Ketiga, isu syariah dan keadilan/HAM. Jika umat Islam sangat mengkhawatirkan adanya upaya masif kristenisasi, sebaliknya apa yang ditakutkan oleh umat non-Muslim di Indonesia adalah soal regulasi syariat Islam di sebuah wilayah administrasi yang biasanya dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah). Di sebuah negara Pancasila, adanya Perda Syariat Islam tentunya membuat warga yang non-Muslim tinggal di wilayah tersebut merasa tidak nyaman dan muncul

kekhawatiran nantinya bahwa Perda tersebut berlaku untuk semua warga yang tinggal di wilayah administrasi tersebut. Namun berbagai tantangan tersebut dapat direduksi atau diminimalisir untuk tidak mengarah pada terjadinya konflik agama jika ada mekanisme dialog. Ataullah Siddiqui percaya bahwa dialog koeksistensi antara dua kelompok akan membantu mengurangi tingkat resistensi dan juga ancaman serta akan membangkitkan kepercayaan yang menjadi nilai penting untuk kehidupan yang damai penuh martabat. (Ataullah Siddiqui: 1998, 85)

Melihat sedemikian besar tantangan dalam hubungan antar umat bergama, Mukti Ali menjelaskan bahwa terdapat beberapa pemikiran yang dapat ditawarkan untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. Pertama, *sinkretisme*, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Kedua, *reconception*, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. Ketiga, *sinthesis*, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu. Keempat, *penggantian*, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. Kelima, *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan. (A. Mukti Ali: 1992, 227-229).

Dari beberapa tawaran di atas, Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan *"agree in disagreement"* sebagai jalan yang harus ditempuh untuk membangun kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.

KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap data empiris lapangan menunjukkan bahwa kontestasi antar kelompok agama yang berbeda (Islam dan Kristen) di Tegalombo menyebabkan terjadinya konflik dan juga akomodasi atau kerjasama membangun perdamaian. Perdamaian dalam relasi antara kelompok Islam dan Kristen terbentuk karena kesadaran elit dan masyarakat kedua agama untuk hidup berdampingan dan bekerjasama. Keasadaran dan sikap tersebut dipengaruhi faktor inklusivitas dalam beragama dan nilai-nilai budaya yang mampu menghidupi toleransi antar kelompok agama yang berbeda.

Hakikat relasi damai diwujudkan dengan semangat inklusivitas keagamaan dengan prinsip bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan menjalankan ibadahnya. Sementara budaya yang menghidupi sikap dan perilaku masyarakatnya menjadi media bertemunya kedua kelompok agama untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam rangka memperkuat solidaritas dan kohesi sosial dengan prinsip mengindahkan eksistensi agama lain. Nilai-nilai budaya seperti tepo seliro, unggah-ungguh, lung tinlung, saling kunjung, slametan diaktualisasikan dalam kehidupan sosial-keagamaan. Relasi damai antara kelompok Islam dan Kristen terbangun karena pola hubungan yang dikembangkan adalah berbasis pada

hubungan adat dan budaya. Penghormatan serta aktualisasi nilai budaya atau kearifan lokal menyebabkan interaksi kedua kelompok agama yang berbeda tidak saling mendominasi baik dalam aspek politik, sosial dan ekonomi. Sedangkan pola *agree in disagreement* menjadi kunci relasi yang harmonis antara Islam dan Kristen di Tegalombo dalam membangun pola hubungan keagamaan.

Sementara kontestasi yang sesungguhnya adalah dalam perebutan dominasi penyiaran dan dakwah agama dengan teknik-teknik tertentu seperti pengajian (Islam) dan KKR (Kristen). Dalam perebutan dominasi itu, masing-masing kelompok menggunakan modal yang mereka miliki seperti modal sosial, kultur, ekonomi dan simbolik. Arena ini kerap memicu ketegangan antara kelompok Islam dan Kristen yang diakibatkan perbedaan konsepsi, saling curiga dan lemahnya mekanisme lokal dalam mengelola konflik antar kelompok agama.

Kontestasi antar kelompok agama berbeda sebagaimana yang terjadi di Tegalombo maupun wilayah lain di Indonesia meskipun telah bisa diredam. Namun, hal itu bisa muncul kembali sewaktu waktu di masa datang jika tidak diantisipasi lebih dini. Maka sangat diperlukan ruang-ruang komunikasi dan interaksi antar umat beragama yang berbeda untuk menjembatani jika ada perbedaan kepentingan dan juga munculnya isu yang bisa memecah integrasi keduanya.

Dengan demikian, dialog-dialog antar lintas agama dan berbagai aliran dan pemahaman dalam internal agama itu sendiri perlu lebih diintensifkan kembali. Hal ini untuk mengantisipasi gejolak konflik yang bisa muncul kapan saja. Menghidupkan kembali forum-forum di masyarakat yang menjembatani dialog antar kelompok berbeda sangat mendesak dilakukan untuk

menyebarkan pemahaman saling melanggengkan hubungan harmonis menghormati dan menerima perbedaan antar umat beragama. agama demi menciptakan dan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Ali, (1992) *Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi'*, dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*, Jakarta: INIS.
- Amstrong, Karen (2000) *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Terj. Satrio Wahono dkk. Bandung: Mizan.
- Amstrong, Karen (2001) *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today World*. New York: Anchor Books.
- Arkoun, Mohammed (2001) *Islam Kontemporer: Menuju Dialog antar-Agama*, Terj. Tim penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Azra, Azyumardi. *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*. Jakarta: Paramadina 1999.
- Boland, B.J. (1985) *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, Terj. Saafoedin Bahar. Jakarta: Grafiti Pers.
- Burke, Peter (2001) *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Coward, Harold (1994) *Pluralisme: Tantangan bagi Agama Agama*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Danie, Norman (1997) *Islam and The West: The Making of an Image*. Oxford: Oneworld Publication.
- G. Pruitt, Dean dan Z. Rubbin (2004) Jeffrey. *Teori Konflik Sosial*, Terj. Hely P. Soetjipto dan Sri Mulayntini Soetjipto. Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Geertz, Clifford (1960). *The Religion of Java*. Glencoe, IL: Free Press.
- Hasani, Ismail (2011) *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat*. Jakarta: Publikasi Setara Institute.
- Hasrullah (2009) *Dendam Konflik Poso*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- I. Candra, Robby (1992) *Konflik dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Yogyakarta: Kanisius.
- J. Benda, Harry (1985) *Bulan Sabit Matahari Terbit*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Knitter, Paul (2002) *Introducing to Theologies of Religions*. New York: Orbis Book.
- L Berger, Peter (1991) *Langit Suci; Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- L. Hocker, Joice dan W. Wimmot, William (1985) *Interpersonal Conflict*. Iowa: Wm. C. Brown Publisher.
- Madjid, Nurcholis. "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan", dalam Ahmad Baso (1999) *Civil Society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran "Civil Society" dalam Islam Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Mujiburrahman, Threatened, Feeling (2006) *Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Leiden: Amsterdam University Press.
- Natsir, M. (1988) *Islam dan Kristen di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.
- Shihab, Alwi (1999) *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.
- Siddiqui, Ataullah (1998) *Christian-Muslim Dialogue: Problems and Challenges' dalam M. Darrol Bryant dan S.A. Ali (ed.), Muslim-Christian Dialogue: Promise and Problem*. United States: Paragon House.
- Soekoco dan M. Yoder, Lawrence (2010) *Tata Injil di Bumi Muria*. Semarang: Pustaka Muria berdasarkan pesanan dari sinode GITJ.

Tatar Pasundan

Jurnal Diklat Keagamaan

ISSN 2085-4005

Volume XIII Nomor 2 Tahun 2019

Suseno, Franz Magnis. "Dialog Antar Agama di Jalan Buntu ?", dalam Roland Dumatheray dkk. (2003) *Agama dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

W. Woodward, Mark (1988) "The Slametan: Textual Knowledge and Ritual Performance in Central Javanese Islam", dalam *Jurnal History of Religion*, Vol. 28, No. 1 Agustus.

Walzer, Michael (1997) *On Toleration*. New Haven and London: Yale University.

Watt, W. Montgomery (1991) *Muslim-Christian Encounters; Perception and Misperception*. London: Routledge.

Yewangoe, A.A. (2002) *Agama dan Kerukunan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.